KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMILIHAN BUPATI BERKEWARGANEGARAAN GANDA

Nama : Nur Annisa Safitri

NIM : 10200120185

Kelas : Hukum Tata Negara-E

Abstrak

Konstitusi merupakan hukum tertinggi dari suatu negara Indonesia mempunyai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi tertulis negara. Dalam kewenangannya Mahkamah Konsititusi hanya berwenang untuk menyatakan sebuah undang-undang bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun dalam perkembangannya putusan Mahkamah Konstitusi perihal pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan sebuah rumusan norma baru agar undang-undang yang bersangkutan dipandang konstitusional ataupun tidak konstitusional, putusan tersebut dikenal dengan putusan konstitusional bersyarat dan putusan konstitusional tidak bersyarat yang menyebabkan sebuah rumusan norma dalam pasal yang diberi syarat tersebut rumusannya berbeda dengan rumusan pasal yang sebelumnya, sementara kewenangan perumusan norma sebuah undang-undang melekat pada badan pembentuk undang-undang yaitu legislative. Hal ini dianggap sebaga pintu masuk bagi Mahkamah Konstitusi untuk melangkahi “kewenangan” badan legislatif.

**KATA KUNCI : *KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMILIHAN BUPATI
BERKEWARGANEGARAAN GANDA***

A. PENDAHULUAN

Sebagai kajian hukum tata negara, pengaturan tentang kewarganegaraan terdapat dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) sampai dengan amandemen ke-4 Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk Pasal 26 “(1) yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. (2) syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.”

Dalam perkembangannya bahkan hingga saat ini Pasal 26 ayat (1) dipertahankan. Selain itu, terdapat pula Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang mengatur masalah kewarganegaraan. Masalah kewarganegaraan merupakan salah satu bagian kajian studi kenegaraan atau biasa disebut Hukum Tata Negara. Salah satu unsur keberadaan negara adalah kewarganegaraan (*algamene staatsleer*). Dalam konteks kenegaraan, masalah kewarganegaraan sangat penting karena pada umumnya, unsur-unsur negara terdiri dari tiga unsur yaitu wilayah, rakyat yang identik dengan warga negara, dan pemerintahan yang berdaulat sebagai unsur konstitutif serta pengakuan dari negara lain sebagai unsur deklaratif.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kewenangan ini diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI tahun 1945) khususnya dalam ketentuan pasal 24 C ayat 1 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu Lembaga negara berfungsi mengawal pelaksanaan konstitusi sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran terhadap konstitusi.¹ Beberapa negara bahkan mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi juga menjadi pelindung (*protector*) konstitusi.² Pada hakekatnya, fungsi utama mahkamah konstitusi adalah mengawal supaya konstitusi dijadikan dengan konsisten (*the guardian of constitutions*) dan menafsirkan konstitusi atau UUD (*the interpreter of constitutions*).³ Dalam teori dan praktik mengenai Mahkamah Konstitusi di berbagai negara wewenang yang selalu melekat dalam tubuh Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian atas konstitusionalitas undang-undang dengan batu uji konstitusi.⁴ Kewenangan menguji (*constitutional review*) yang dimiliki dan dilaksanaannya meliputi semua produk legislative (*legislative acts*) yang merupakan perangkat hukum yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam setiap sistem politik di bawah Undang-Undang Dasar.⁵

¹ Patrialis akbar 2013, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUDNRI Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, 178

² Maruarar Siahaan, 2012, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Edisi 2*, Sinar Grafika, Jakarta, h.7

³ Nomensen Sinamo, 2012, *Hukum Tata Negara Suatu Kajian Kritis tentang Kelembagaan Negara*, Permata Aksara, Jakarta, h.89.

⁴ Patrialis Akbar, *op.cit.*, h. 178

⁵ Jimly Assidique, 2010, *model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, sinar Grafika Jakarta

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah pengertian negara dan warga negara?
2. Apakah pengertian Mahkamah konstitusi?
3. Bagaimanakah kedudukan kewenangan konstitusi?
4. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pemilihan bupati WNA

C. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif* karena masalah yang akan diteliti ada hubungannya dengan sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi dan dasar filosofis, yuridis, maupun sosiologis tentang kedudukan dan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia.

Spesifikasi penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, karena diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh dengan objek yang akan diteliti, yakni kaitannya kedudukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh dalam penelitian, kemudian akan dianalisis secara *kualitatif*, yaitu data yang diperoleh kemudian akan disusun secara sistematis yang selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan mengenai kedudukan dan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia.

D. PEMBAHASAN

1. NEGARA DAN WARGA NEGARA

Negara dan Warga Negara Negara diterjemahkan dari bahasa asing, yaitu *etat* (Prancis), *state* (Inggris), *staat* (Belanda dan Jerman). Sejumlah pakar mencoba mendefinisikan kata negara. Miriam Budiardjo, pakar ilmu politik, merangkum pengertian dari istilah negara menurut beberapa ahli, antara lain yaitu:

1. Roger F. Soltau mengartikan bahwa "Negara adalah alat yang mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat";
2. Harold J. Lasky mengartikan bahwa "Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan, karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah"; dan
3. Robert M. Maclever mengartikan bahwa "Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberikan kekuasaan memaksa".

Konvensi Montevideo pada 1993 menyatakan negara dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional apabila telah mempunyai unsur-unsur, yaitu penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintah, dan kemampuan mengadakan hubungan dengan negara-negara lainnya. Melihat unsur-unsur negara, maka Indonesia masuk dalam kategori suatu

negara. Negara Indonesia berdiri pada 17 Agustus 1945 pada saat Soekarno dan Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan. Pembacaan proklamasi itu menandakan berdirinya Negara Indonesia secara de facto. Sementara itu, secara de jure, Negara Indonesia berdiri pada 18 Agustus 1945 atau pada saat UUD NRI Tahun 1945 lahir. Oleh para pendiri bangsa, Indonesia dicita-citakan sebagai suatu negara hukum. Melihat Indonesia sebagai negara hukum, maka konsep Negara Hukum, yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi.⁶ Penerapan prinsip negara hukum Indonesia berpedoman pada unsur-unsur negara hukum secara umum, yaitu upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan, pelaksanaan kedaulatan rakyat, penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adanya peradilan administrasi negara.⁷ UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia mengatur Wilayah Negara, Warga Negara, dan Penduduk serta Hak Asasi Manusia. Isu pokok yang menjadi pedoman perkembangan prinsip-prinsip negara hukum, yaitu masalah pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia. Kepentingan paling mendasar dari setiap warga negara adalah perlindungan terhadap hak-hak sebagai manusia.⁸ Jaminan perlindungan dan pemenuhan hak warga negara dalam konstitusi telah dicantumkan di UUD NRI Tahun 1945. Sejumlah pasal di UUD NRI Tahun 1945 mengatur mengenai hak warga negara dan kewajiban negara. Pemerintah perlu membuat kebijakan untuk mengimplementasikan ketentuan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.

PENGATURAN STATUS KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA

Status kewarganegaraan ditentukan berdasarkan kesepakatan di dalam suatu negara. Ketentuan itu menjadi pedoman menentukan status kewarganegaraan.¹⁰ Penentuan status kewarganegaraan didasarkan pada kewarganegaraan yang diperoleh seseorang. Kewarganegaraan seseorang diperoleh berdasarkan tempat kelahiran atau *Ius Soli* dan kewarganegaraan yang diperoleh berdasarkan hubungan darah atau *Ius Sanguinis*. Perbedaan asas *Ius Soli* dan *Ius Sanguinis* mengakibatkan munculnya kewarganegaraan ganda. Sejumlah negara, seperti Amerika Serikat, Australia, Kanada, Selandia Baru, Swiss, Turki, Jamaika menganut kewarganegaraan ganda. Sampai saat ini, setidaknya terdapat 44 negara yang menerapkan kewarganegaraan ganda. Kewarganegaraan ganda lahir karena negara-negara itu memiliki persyaratan kewarganegaraan berbeda. Status kewarganegaraan bagi individu adalah suatu hal yang sangat penting. Warga negara merupakan salah satu unsur atau syarat berdirinya negara. Negara dan warga negara mempunyai hubungan timbal balik. Individu yang menjadi warga negara wajib mematuhi segala ketentuan hukum yang dibuat negara dan negara wajib melindungi warga negara di mana pun berada. Namun pada kenyataannya, di suatu negara terdapat seorang tidak mempunyai status kewarganegaraan atau *apatride* dan mempunyai lebih dari dua kewarganegaraan atau *multipatride*. Konvensi 1954 mengenai Status Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan mendefinisikan orang tanpa kewarganegaraan sebagai orang yang tidak dianggap sebagai warga negara oleh negara manapun di bawah yurisdiksi hukum. Belakangan ini terjadi peningkatan populasi orang tanpa kewarganegaraan atau berpotensi berisiko tanpa kewarganegaraan. Salah satu negara

yang mengalami peningkatan populasi orang tanpa kewarganegaraan tersebut, yaitu Amerika Serikat. Politik hukum kewarganegaraan Indonesia menganut prinsip berkewarganegaraan tunggal. Prinsip kewarganegaraan tunggal sudah dianut sejak kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Adapun beberapa peraturan tentang kewarganegaraan di Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1947 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; serta 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Memilih kewarganegaraan merupakan hak asasi manusia. Sehingga, siapapun termasuk negara tidak dapat memaksakan kehendak kepada seseorang menentukan kewarganegaraan. Perkawinan campuran yang berbeda kewarganegaraan merupakan dampak dari interaksi antar umat manusia di dunia. Perkawinan campuran tidak dapat dilarang, karena ini merupakan hak asasi manusia untuk memilih seseorang menjadi pasangan hidup. Perkawinan campuran berdampak hukum pada status kewarganegaraan suami dan istri serta anak yang hadir dari hasil perkawinan tersebut. Atas dasar itu, negara tidak boleh menggunakan instrumen undang-undang memaksa seorang anak memilih ikut kewarganegaraan ayah atau ibu, Negara hanya berkepentingan seseorang memenuhi kewajiban sebagai warga negara. Negara bertanggungjawab melindungi warga negara, sebagaimana berdasarkan Pasal 28 D ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa "setiap orang berhak atas status kewarganegaraan". Pada ketentuan itu, tidak dijelaskan seseorang berhak atas satu atau dua status kewarganegaraan. Hanya mengatur seorang warga negara harus mempunyai kewarganegaraan dan tidak berstatus tidak mempunyai kewarganegaraan. Untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara dan memberikan jaminan kepastian hukum tentang siapa saja Warga Negara Indonesia itu sehingga tercermin adanya persamaan hukum di antara warga negara. Di sejumlah negara, ada yang melegalkan seseorang memiliki kewarganegaraan ganda ada juga yang melarang adanya kewarganegaraan ganda.

KEWENANGAN WNA di PILKADA SABU RAIJUA DIBATALKAN

Mahkamah konstitusi membatalkan kewenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati **Sabu Rijua**, nomor urut 2 (Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly) dalam sidang putusan sengketa pilkada pada 15 April 2021. Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan hakim MK, Saldi Isra, bahwa calon kepala daerah sebagai bakal pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten tahun 2020, haruslah berstatus Warga Negara

Indonesia.

"karena pada yang bersangkutan masih melekat status sebagai warga negara Amerika Serikat pada saat mendaftarkan diri sebagai bakal calon bupati dari pasangan calon nomor urut 2, maka status Orient Patriot Riwu Kore sebagai calon bupati dari pasangan calon nomor urut 2 harus dinyatakan batal demi hukum". Tegas Saldi Isra.

Lebuh lanjut dijelaskan, sekalipun wakil bupati memenuhi syarat namun karena keduanya merupakan pasangan calon sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU Kab/IX/2020 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta calon bupati dan wakil bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Sabu Raijua tahun 2020, maka dengan sendirinya calon wakil bupati menjadi gugur sebagai pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Sabu Raijua tahun 2020.

berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 138/PAN.MK/AP3/02/2020, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Februari 2021 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 134/PHP.BUPXIX/2021 pada tanggal 26 Februari 2021 yang pada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI a. Bahwa Pasal 24C ayat (1) (2) (3) UUD 1945 menyatakan:

(1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.5 b. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi (constitutionally entrusted powers) adalah:

a. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

b. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

c. Memutus pembubaran partai politik.

d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

e. Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan bagian dari pemilihan umum sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan para Pemohon.

f. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil tahap akhir pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

g. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata

Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menyatakan bahwa objek sengketa dalam perselisihan hasil pemilihan adalah “keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.

- i. Bahwa sekalipun demikian patutlah kiranya dipahami bahwa “keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih” di atas yang dalam perkara a quo adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 (Bukti P-1), yang kemudian diikuti oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPUKab/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, 6 tanggal 23 Januari 2020 (Bukti P-2), BUKANLAH merupakan sebuah peristiwa hukum yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan kelanjutan dari proses dan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Sabu Raijua sebagai berikut:
- j. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 (Bukti P-3)
- k. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153/HK.03.1-Kpt/5320/Kpu-kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, beserta Lampirannya, tanggal 24 September 2020 (Bukti P-4).
- l. Bahwa Permohonan para Pemohon berawal dari Surat yang ditandatangani oleh Erick M. Alexander, Konsul Jenderal Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia, Jakarta, tanggal 1 Februari 2021 yang intinya menyatakan bahwa “We would like to inform you that Mr. Orient Patriot Riwu Kore is holding a US citizenship” (Kami ingin menginformasikan kepada anda bahwa Tuan Orient Patriot Riwu Kore memegang kewarganegaraan Amerika Serikat) (Bukti P-5).
- m. Bahwa surat Konsul Jenderal Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia, Jakarta, tanggal 1 Februari 2021 di atas merupakan jawaban atas Surat yang dilayangkan Bawaslu Sabu Raijua Nomor 136/K.Bawaslu- SR/HK.00.021/ IX/2020 Perihal Status Kewarganegaraan Amerika Serikat Orient Patriot Riwu Kore (Bukti P-6).
- n. Bahwa akibat dari Calon Bupati Sabu Raijua sebagai dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore memiliki kewarganegaraan Amerika (WNA) maka secara formal pemenuhan syarat untuk ditetapkan sebagai calon Bupati mengandung cacat hukum formil karena seharusnya hanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat mencalonkan diri sebagai Calon Bupati. Oleh karena itu, penetapan Orient Patriot Riwu

Kore sebagai bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 haruslah dinyatakan bertentangan 7 dengan hukum (illegal) ataupun BATAL DEMI HUKUM (NULL AND VOID atau VOID AB INITIO).

- o. Bahwa cacat formil di atas telah tidak diketahui sejak awal dari Termohon karena ketidakjujuran dari Calon Bupati Sabu Raijua yakni Orient Patriot Riwu Kore dalam menyampaikan syarat yang terkait dengan status WNI-nya yang berujung pada adanya penetapan Termohon atas Orient Patriot Riwu Kore sebagai Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.
- p. Bahwa penetapan Termohon atas Orient Patriot Riwu Kore sebagai Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 yang secara nyata mengandung cacat formil tersebut telah memberi kesempatan nyata bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk tetap mengikuti tahapan selanjutnya antara lain pemilihan, rekapitulasi hasil pemilihan dan yang kemudian diikuti dengan penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.
- q. Bahwa kalau saja sejak awal TERMOHON CERMAT dan TIDAK LALAI/TELEDOR dan/atau kalau saja Orient Patriot Riwu Kore bersikap jujur dalam menyampaikan syarat terkait status kewarganegaraannya maka Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon Bupati. Dengan demikian Orient Patriot Riwu Kore dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 seharusnya tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sehingga oleh karenanya tidak dapat mengikuti proses lainnya antara lain pemilihan, proses rekapitulasi hasil dan proses penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 .
- m. Bahwa persoalan hukumnya sekarang ialah cacat formil terkait status kewarganegaraan Amerika Calon Bupati dari Pasangan Calon 02 yakni Orient Patriot Riwu Kore dalam perkara a quo diketahui belakangan namun calon tersebut telah terlanjur ditetapkan oleh Termohon sebagai pasangan calon Bupati dari Paslon Nomor Urut 2, telah mengikuti proses pemilihan dan 8 ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dan lalu telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih Sabu Raijua.
- n. Bahwa atas persoalan cacat formil syarat pencalonan Calon Bupati dari Paslon 02 tersebut di atas seharusnya pencalonan Paslon Nomor Urut 2 tersebut harus dinyatakan batal demi (NULL AND VOID atau VOID AB INITIO) oleh Termohon atau jika Termohon tidak membatalkan keputusan/keputusannya maka pembatalan dapat dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi. Persoalannya ialah bagaimana membatalkan SK-SK Termohon sebagaimana telah dinyatakan para Pemohon di atas dalam perihal permohonan ini?
- o. Bahwa berdasarkan tinjauan hukum yang dilakukan para Pemohon, disimpulkan bahwa saat ini penyelesaian persoalan ini tidak dapat diselesaikan melalui proses gugatan TUN Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 dan 11 jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi

Pemilihan karena telah lewat waktunya (daluarsa).

- p. Bahwa penyelesaian sengketa terkait Calon Bupati dari Pasangan 02 Orient Patriot Riwu Kore yang memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat ini juga sudah tidak bisa diselesaikan oleh Bawaslu sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 142 jo. Pasal 143 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang karena telah lewat waktunya (daluarsa). Pasal 142 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016: Sengketa Pemilihan terdiri atas: 1. sengketa antar peserta Pemilihan; dan 2. sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan. Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 "Bawaslu Provinsi dan Panwaslu memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan".
- q. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 9 Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang juga tidak mengatur mengenai diskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati yang telah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih tetapi belakangan diketahui pencalonannya cacat formil yang dalam permohonan ialah tidak memenuhi persyaratan sebagai WNI karena yang bersangkutan memiliki warga negara asing yakni warga negara Amerika Serikat.
- r. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setelah mengkaji peraturan peundang-undang yang berlaku saat ini (existing regulations), terdapat kekosongan hukum (recthsvacuum) sehingga berdasarkan kewenangan yang dijamin oleh Pasal 24G ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi dipandang perlu dalam fungsinya sebagai the positive legislator untuk melakukan penemuan hukum (rechctsvinding) untuk memecahkan kebuntuan hukum dan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan substantive (materil) bagi para Pemohon dan bagi tegaknya konstitusi, hukum dan moral, sekaligus untuk memberikan solusi bagi kelanjutan sistem dan roda pemerintahan di Kabupaten Sabu Raijua.
- s. Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut para Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara:
 - i. Penemuan hukum untuk mengatasi kebuntuan dan kekosongan hukum sehubungan dengan status kewarganegaraan asing (Amerika Serikat) Bupati terpilih Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur.
 - ii. Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 .
 - iii. Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, beserta Lampirannya, tanggal 24 September 2020.10

- iv. Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 2020.
- v. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Januari 2020.

Berdasarkan ketentuan di atas, Indonesia tidak mengenal kewarganegaraan ganda atau bipatride dan tanpa kewarganegaraan atau apatride. UU No. 12 Tahun 2006 mengatur status kewarganegaraan. Status kewarganegaraan itu tidak hanya sekedar ketentuan, tetapi mempunyai kekuatan mengikat berupa status hukum yang memberikan hak dan perlindungan warga negara sebagaimana diatur di berbagai peraturan perundang-undangan

DASAR FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS TENTANG KEDUDUKAN DAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin konstitusi sebagai hukum tertinggi agar dapat ditegakkan, sehingga Mahkamah Konstitusi disebut dengan *the guardian of the constitution*.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi ini setingkat atau sederajat dengan Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka⁶ dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam menjalankan kewenangannya, termasuk di dalamnya adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, Mahkamah Konstitusi juga melakukan penafsiran konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi juga disebut *the sole interpreter of the Constitution*. Sebagai lembaga penafsir tunggal konstitusi, banyak hal dalam mengadili menimbulkan akibat terhadap kekuasaan lain dalam kedudukan berhadapan-hadapan, terutama terhadap lembaga legislatif dimana produknya di review.

Kedudukan mahkamah konstitusi dipahami sebagai pengawal konstitusi untuk memoerkuat dasar-dasar konstitusionalisme dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan dengan batasan yang jelas sebagaibentuk penghormatan atas konstitusionalisme. Batas-batas kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga yudisial merupakan bentuk terselenggaranya sistem perimbangan kekuasaan di antara lembaga negara (*checks and balances*).

Keadilan substantif/keadilan materiil (*substantive justice*) merupakan *al qist* atau bagian yang wajar dan patut, tidak mengarahkan kepada persamaan, melainkan bagian yang patut, berpihak kepada yang benar. Dalam penerapan keadilan substantif ini, pihak yang benar akan mendapat kemenangan sesuai dengan bukti-bukti aka kebenarannya.

Teori-teori yang menjadi dasar pentingnya reformasi konstitusi dan menjadi dasar wewenang serta kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah teori kedaulatan negara, teori konstitusi, teori negara hukum demokrasi, teori kesejahteraan, teori keadilan dan teori kepastian hukum.

⁶ Miktahul Huda, September 2007, *"Ultra Petita" dalam Pengujian Undang-Undang*, dalam jurnal Konstitusi Volume 4, Nomor 3, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta h, 144

Dasar yuridis wewenang Mahkamah Konstitusi berasal dari Undang-Undang Dasar 1945 yang diatur dalam pasal 7A, pasal 78, dan pasal 24C dan dijabarkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Terhadap perorangan, kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup, badan hukum publik atau privat, lembaga negara, partai politik, ataupun pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat jika hak dan atau wewenang konstitusionalnya dirugikan, dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang berwenangnya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Memutus pembubaran partai politik
- Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

Mahkamah konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Pelanggaran dimaksud sebagaimana disebutkan dan diatur dalam ketentuan pasal 7A Uud 1945 yaitu melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷

Dalam menunaikan kewenangan dan menegakkan keadilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan untuk memanggil pejabat negara, pejabat pemerintahan, serta warga negara untuk memberikan keterangan. Keterangan tersebut dapat berupa lisan maupun tulisan yang menyangkut suatu perkara. Mahkamah konstitusi memandang semua lembaga negara dalam kedudukan yang sama. Semua lembaga negara bisa diperiksa, diadili, dan dijaga keseimbangannya agar penyelenggaraan negara tetap adil.⁸

Berdasarkan UUD 1945 pasal 24C ayat ke 3 terdapat tiga lembaga negara yaitu DPR, Presiden dan Mahkamah Agung yang mengajukan Hakim konstitusi yang masing-masing tiga. Terdapat sembilan hakim konstitusi pertama dengan masa jabatan 2003-2008 yang dipimpin oleh Jimly Asshiddiqie dan wakilnya Laica Marzuki. Dalam pelaksanaan tugas konstitusional MK membutuhkan dukungan administrasi aparatur pemerintah yang bersifat administrasi ataupun administrasi yustisial.

Dukungan administrasi umum dilaksanakan oleh sekretaris Jenderal MPR untuk pertama kalinya. Selanjutnya ditetapkan kepaniteraan MK yang memiliki tugas ketua dan hakim MK pada bidang administrasi yustisial. Panitera memiliki tanggung jawab dalam menangani perihal seperti pendaftaran permohonan dari para pemohon, pemeriksaan

⁷ Mkri.id ***mahkamah konstitusi Republik Indonesia Lembaga Negara Pengawal Konstitusi***

⁸ Kompas.com ***Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi***

kelengkapan permohonan, pencatatan permohonan yang sudah lengkap dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi hingga mempersiapkan serta membantu pelaksanaan persidangan MK. Pada masa dipimpin Mohammad Mahfud MD, lembaga ini menjadi pusat perhatian publik karena putusan-putusannya yang dianggap dapat memecah kebuntuan hukum ketatanegaraan serta mengedepankan prinsip keadilan substansial. Dalam putusan-putusan tersebut sangat menarik perhatian diskursus akademis pada bidang Hukum Tata Negara yang memicu lahirnya lembaga studi hukum tata negara di kampus ataupun organisasi. Kemudian ketertarikan masyarakat terhadap pengembangan hukum konstitusi disambut secara positif oleh MK dengan didirikannya Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Kemudian MK mendapat pengalihan mengadili sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dari MA. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum. Dalam perkembangannya, kewenangan mengadili sengketa perselisihan hasil pilkada ke MK. Regulasi tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Pada ranah internasional kiranya MK meningkat dengan keterlibatannya dalam mendirikan *The association courts and equivalent institution (AACC)* yang dideklarasikan pada 2010 di Jakarta. Pada 11-12 Juli MK menyelenggarakan kegiatan simposium internasional dengan tema *Democratic State* atau negara demokrasi konstitusional dengan peserta 23 negara. Pada era kepemimpinan MK oleh Hamdan Zoelva, MK mengeluarkan putusan yaitu menghapus penanganan gugatan pemilukada kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan kabupaten Lebak, Banten. Kasus ini meruntuhkan harapan publik terhadap MK.

Kemudian pada era kepemimpinan MK oleh Hamdan Zoelva, MK mengeluarkan putusan yaitu menghapus penanganan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dari kewenangan MK. Alasannya, pilkada bukanlah bagian dari rezim pemilu. Karena itu, penanganan perselisihan hasil pilkada diserahkan kepada pembuat undang-undang. Pada era ini, MK membentuk Dewan Etika Hakim Konstitusi yang bertugas menjaga martabat serta keluhuran hakim konstitusi.

Selanjutnya pada era kepemimpinan Arief Hidayat, MK mendapat kewenangan lagi untuk menangani perkara perselisihan hasil pilkada dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Kewenangan yang diberikan bersifat hanya sementara selama badan peradilan khusus pilkada belum dibentuk. MK menangani perkara terkait perselisihan hasil pilkada yang mulai tahun 2015 dilaksanakan secara serentak bertahap.

Pada 2 April 2018 Anwar Usman terpilih sebagai ketua MK hingga periode saat ini. Anwar Usman didampingi oleh Aswanto sebagai wakil ketua MK. Dimasa kepemimpinannya, dari 171 pilkada serentak 2018 terdapat 72 perkara perselisihan hasil Pilkada (PHPKada) serentak yang diajukan dan ditangani MK.

Pengaturan kewenangan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 diatur dalam pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) yang mengatur bahwa pengujian Undang – Undang terhadap UUD di latar belakang dengan adanya indikasi pelanggaran hak dan atau kewenangan konstitusional. Hak konstitusional merupakan hak-hak yang di atur dalam UUD NRI Tahun 1945. Hak-hak yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 itu mencakup hak-hak yang tergolong ke dalam hak warga negara (*citizen right*) maupun hak-hak yang tergolong ke dalam hak asasi manusia (*human right*)⁹. Hak konstitusional yang dimiliki oleh warga negara tersebut tentu saja harus dilindungi dan di jamin oleh negara Republik Indonesia sebaga negara hukum .

Ketentuan pasal 55 dalam uu mk menentukan bahwa pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang di lakukan Mahkamah Agung Wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada keputusan Mahkamah Konstitusi. Permasalahan kemudian muncul apabila tidak ada yang menguji undang-undang yang diragukan konstitusionalitasnya. Hal ini memunculkan suatu pertanyaan apakah hakim boleh bertanya kepada Mahkamah Konstitusi mengenai Konstitusionalitas undang-undang yang akan dipergunkannya untuk memutuskan suatu perkara. Permasalahan tersebutlah yang kemudian memunculkan gagasan pertanyaan konstitusional atau *conctitutional question*.

Hal positif kedua adalah mengingat ruang pengujian terhadap peraturan perundang-undangan smakin luas, apalagi hakim pengadilan adalah profesi yang mempunyai kapasitas lebih untuk mengetahui adanya kemungkinan pertentangan norma. Hakim dianggap memiliki kapasitas lebih untuk mengetahui kemungkinan adanya inkonstitusionalitas dari undang-undang akan diterapkannya dalam suatu perkara. Hal ini tentu saja meberikan manfaat bagi warga negara yang kurang memiliki kesadaran dan/atau kemampuan dalam mempertahankan hak-hak konstitusionalnya yang di jamin konstitusi , tanpa yang bersangkutan harus secara aktif mengajukan permohonan pengujian undang-undang itu ke MK.

Manfaat yang ketiga adalah dapat dihindari adanya pelanggaran hak konstitusional yang tidak di perlukan karena pengajuan judicial review harus menunggu adanya putusan pengadilan atau proses pengadilan di hentikan sementara. Dengan adanya mekanisme (*constitutional question*) , maka dapat menghindari pelanggaran hak konstitusional yang tidak di perlukan dalam hal ini yakni jangka waktu perhentian proses beracara yang dapat diminimalisir dengan adanya putusan Mahkamah Kostitusi yang lebih cepat dibandingkan mekanisme *judicial review*.

Berdasarkan pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan pasal 24C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan lagi oleh pasal 10 ayat (2) UU 24/2002, kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

⁹ I Dewa Gede Pelguna, 2013, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)*, Sinar Grafika, Jakarta, h.39

Konstitusi merupakan hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara,¹⁰ sehingga dalam konstitusi memang terdapat aturan-aturan hukum yang mengatur organ-organ tersebut, tata hubungan sesamanya, dan lingkup kerja masing-masing, serta berisi aturan-aturan hukum mengenai tata hubungan timbal balik antara negara dan warga negara, serta pendukungnya.¹¹

Pengakuan adanya konstitusi atau undang-undang dasar negara baik tertulis, maupun tidak tertulis dapat memberikan suatu pembahasan mendasar pada kekuasaan badan legislatif. Sebab, konstitusi merupakan sumber hukum bagi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, konstitusi berguna untuk menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai satu fungsi konstitusionalisme dan memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintahan.¹²

Karenanya salah satu materi penting dan selalu ada dalam konstitusi adalah pengaturan tentang lembaga negara. Menurut Jimly Asshiddiqie, hal tersebut dapat dimengerti sebab kekuasaan negara pada akhirnya diterjemahkan ke dalam tugas dan wewenang lembaga negara. Montesquieu, dalam teori Trias Politika, membagi kekuasaan negara itu secara horizontal, sehingga terdiri atas tiga cabang kekuasaan, yaitu cabang kekuasaan legislatif (kekuasaan untuk membuat undang-undang), cabang kekuasaan eksekutif (kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang), dan cabang kekuasaan yudikatif (kekuasaan untuk mengadili pelanggaran undang-undang). Montesquieu menyatakan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, ketiga cabang kekuasaan itu tidak boleh bertumpu pada satu organ, tetapi harus dipisahkan satu dengan lainnya (*separation of power*). Dengan kata lain, setiap fungsi kekuasaan harus dijalankan oleh organ yang berbeda. Montesquieu membedakan hal tersebut, walau diakui bahwa keduanya merupakan unsur pokok yang saling berkaitan. Organ adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan *functie* adalah isinya.

Fungsi, kedudukan, dan wewenang menurut Hasan Zaini, memang sangat berkaitan. Fungsi dapat diartikan suatu lingkungan kerja untuk mencapai tujuan tertentu. Kedudukan suatu lembaga negara ditentukan oleh fungsinya. Untuk dapat menjalankan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan tertentu, lembaga negara harus dilengkapi dengan wewenang (kekuasaan).

Mahkamah konstitusi menilai memang terdapat persoalan konstitusionalitas dalam kalimat pertama penjelasan pasal 2 ayat (1) UU PTPK, sehingga Mahkamah perlu mempertimbangkan lebih lanjut hal-hal sebagai berikut

- Pasal 28D ayat (1), mengakui dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti, dengan mana dalam bidang hukum pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas yang dimuat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, bahwa asas tersebut merupakan satu tuntutan akan kepastian hukum dimana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis yang telah lebih dulu ada.
- Hal demikian menuntut bahwa suatu tindak pidana memiliki unsur melawan hukum, yang harus secara tertulis lebih dahulu terus berlaku, yang merumuskan perbuatan

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Amandemen Konstitusi*

¹¹ A Hamid S, Attamimi, *Teori Perundang-undangan Indonesia*

¹² R.M Mac Iver, *Negara Modern (the modern state)* diterjemahkan oleh Moertono

apa atau akibat apa dari perbuatan manusia secara jelas dan serinci mungkin (vide Jan Remmelink, hukum pidana, 2003:358) merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum atau yang dikenal juga istilah *Bestimmtheitsgebot*.

Putusan mahkamah konstitusi tidak tegas disebutkan mana di antara kedua fungsi dari ajaran atau konsep melawan hukum materiil itu yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kiranya tidak akan ada perbedaan pendapat jika dikatakan bahwa putusan mahkamah konstitusi itu yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah ajaran atau konsep melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif saja, sedang ajaran atau konsep melawan hukum dalam fungsinya yang negatif tetap masih berlaku. Dengan demikian, praktik menunjukkan bahwa putusan mahkamah konstitusi, dapat saja disimpangi oleh hakim atau aparat penegak hukum lainnya dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia.

Pada akhirnya, dengan amandemen ketiga undang-undang dasar 1945 yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat lahirlah sebuah lembaga negara baru, yakni mahkamah konstitusi, yang berfungsi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*) dan juga berperan sebagai penafsir konstitusi (*the interpreter of constitution*).

Eksistensi mahkamah konstitusi terwujud dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya setelah Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah menyetujui diundangkannya undang-undang terhadap undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Satu kewajiban konstitusional mahkamah konstitusi, yakni memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden menurut undang-undang dasar.

Judicial review oleh mahkamah konstitusi sebagai kontrol antar lembaga-lembaga untuk terwujudnya cita negara hukum yang demokratis. Dalam melaksanakan kewenangannya, mahkamah konstitusi telah menegaskan dirinya sebagai lembaga negara pengawal demokrasi dengan menjunjung prinsip peradilan yang pengawal demokrasi dengan menjunjung prinsip peradilan yang menegakkan keadilan substantif dalam setiap putusannya. Keadilan disini menjadi dasar filosofis pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

rahmawati Novia Sigit. (2020). Perlindungan Terhadap Orang Tanpa Kewarganegaraan (Stateless People) dalam Hukum Internasional (Studi Kasus Etnis Rohingya di Myanmar). Uti Possidetis, Universitas Jambi, 1(1), hlm. 113.

Putusan MKRI dalam pemilihan kepala daerah rabu rajua

Patrialis akbar 2013, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUDNRI Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, 178

Maruarar Siahaan, 2012, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Edisi 2*, Sinar Grafika, Jakarta, h.7

Nomensen Sinamo, 2012, *Hukum Tata Negara Suatu Kajian Kritis tentang Kelembagaan*

Negara, Permata Aksara, Jakarta, h.89.

Patrisalis Akbar, *op.cit.*, h.178

Jimly Assidique, 2010, *model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Sinar Grafika Jakarta

I Dewa Gede Palguna, 2013, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)*, Sinar Grafika, Jakarta, h.39

Mikhtahul Huda, September 2007, ***"Ultra Petita" dalam Pengujian Undang-Undang***, dalam jurnal Konstitusi Volume 4, Nomor 3, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta h, 144

Mariyadi Faqih, Juni 2010, ***nilai-nilai filosofi putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat***, dalam jurnal konstitusi volume 7 nomor 3, Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, h.97

Indra Perwira, dkk, November 2010, ***Budaya Konstitusi (Constitutional Culture) Dalam UUD 1945 Perubahan Dilakukan Dengan Gagasan Perubahan Kelima UUD 1945***, dalam Jurnal Konstitusi Volume II Nomor 2, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, h.60

Mkri.id ***mahkamah konstitusi Republik Indonesia Lembaga Negara Pengawal Konstitusi***

I Dewa Gede Palguna, 2013, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)*, Sinar Grafika, Jakarta, h.39

Jurnal Konstitusi, Volume 7, nomor 3, Juni 2010